

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2026**

KATAPENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun pada akhir periode anggaran, pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 25 Februari 2026



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BABI PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang.....	4
Dasar Hukum.....	5
Tupoksi.....	5
Permasalahan dan Isu Strategis.....	6
Uraian Singkat Organisasi.....	6
BABII PERENCANAAN KINERJA.....	7
Perencanaan Strategis.....	7
Perjanjian Kinerja.....	11
BABIII AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
Capaian Kinerja.....	35
Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	38
BAB IV PENUTUP.....	55
Kesimpulan.....	55
Perbaikan Kedepan.....	56
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 7) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 62 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diantaranya :

- 1) Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
- 2) Keanekaragaman koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pertumbuhan perpustakaan baik di sekolah maupun di desa/kelurahan;
- 4) Masih rendahnya minat baca dan minat kunjung ke perpustakaan.
- 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga banyak wilayah terpencil belum terlayani oleh mobil keliling perpustakaan.
- 6) Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip dilingkungan pemerintah daerah;
- 7) Belum optimalnya dalam retrieval (pencarian) arsip;
- 8) Belum optimalnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan kearsipan;
- 9) Terbatasnya SDM fungsional pustakawan dan Arsiparis di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Kedudukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja perangkat daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam Pelaksanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dirancang melalui lima tahapan pengembangan yang saling berkesinambungan. Setiap tahap menggambarkan capaian yang ingin diraih dalam membangun literasi masyarakat serta memperkuat tata kelola dan ketersediaan arsip sebagai unsur penting akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahapan ini meliputi pembangunan fondasi, penguatan layanan, pembentukan budaya, integrasi, hingga pemantapan dan akselerasi.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026.

Adapun Visinya adalah : “***Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan***”.

Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mendukung pelaksanaan misi yaitu “***Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten***”

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021– 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi: <i>"Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"</i>				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan yang Berkualitas guna mendukung Pengembangan Budaya Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Kategori B	Terwujudnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Tingkat Ketersediaan Arsip

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Peningkatan Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan;
3. Meningkatkan Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno;
4. Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Strategidan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Peningkatan kompetensi SDM aparatur
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan
		Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan
		Pendampingan pengelolaan Kearsipan kepada setiap OPD
2	Pengembangan Inovasi pelayanan perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan Perpustakaan
3	Pengembangan Inovasi Pengelolaan Kearsipan	Pengembangan pengelolaan Kearsipan dan Pembinaan serta Pengawasan Tertib Arsip

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Penghitungan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	95	Nilai Tingkat ketersediaan arsip di peroleh dari persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	16	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dengan Data Awal Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2024)	Target 2025	Target Akhir Renstra 2025
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	73	73
2	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	90	95	95
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	15	16	16

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercatat sebesar 72. Untuk tahun 2025, ditetapkan target sebesar 73, yang sekaligus menjadi target akhir dalam Renstra Tahun 2025.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang terukur sebesar 1 poin dari kondisi awal. Penetapan target yang sama antara target tahunan 2025 dan target akhir Renstra mengindikasikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun pencapaian akhir periode perencanaan, dengan fokus pada peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara optimal dan berkelanjutan.

2. Tingkat Ketersediaan Arsip

Data awal tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 90. Target tahun 2025 ditetapkan sebesar 95 dan angka tersebut juga merupakan target akhir Renstra Tahun 2025.

Artinya, terdapat kenaikan target sebesar 5 poin dari kondisi awal. Kenaikan ini mencerminkan komitmen peningkatan kualitas pengelolaan arsip agar lebih optimal dalam mendukung akuntabilitas kinerja, penyediaan alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban nasional. Dengan target akhir Renstra yang sama dengan target tahunan 2025, maka capaian pada tahun 2025 menjadi penentu keberhasilan sasaran strategis di bidang kearsipan.

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat berada pada angka 15. Untuk tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 16, dan angka tersebut juga menjadi target akhir Renstra Tahun 2025.

Peningkatan sebesar 1 poin ini menunjukkan adanya upaya penguatan penyelenggaraan perpustakaan dan pengembangan budaya baca masyarakat.

Keselaran antara target tahunan dan target akhir Renstra menandakan bahwa tahun 2025 merupakan titik akhir capaian yang telah direncanakan dalam periode strategis, sehingga diperlukan optimalisasi seluruh program literasi agar target tersebut dapat tercapai.

Secara umum, seluruh indikator sasaran menunjukkan adanya peningkatan target dari data awal tahun 2024 menuju target tahun 2025 yang sekaligus menjadi target akhir Renstra. Hal ini menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun kunci dalam pencapaian sasaran strategis, sehingga diperlukan konsistensi pelaksanaan program, penguatan pengendalian kinerja, serta optimalisasi sumber daya untuk memastikan seluruh target dapat tercapai sesuai perencanaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤100%	Sangat Tinggi
76% ≤90%	Tinggi
66% ≤75%	Sedang
51% ≤65%	Rendah
≤50%	Sangat Rendah

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Adapun perbandingan antara target dan realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2025							
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
1	Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	16	12.81	80.06	Tinggi

2	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Persen	95	100	105.26	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)	89.26	101.087	Sangat Tinggi
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100	Sangat Tinggi
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
10	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)	3.2568	88.02	Tinggi
12	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65.92	85.61	Tinggi
13	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71.51	110.015	Sangat Tinggi

14	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
----	---	---	--------	-----	-----	-----	---------------

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat.

Target kinerja indikator Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat 16 dengan realisasi 12.81 capaian kinerja sebesar 80.06% berdasarkan perhitungan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tidak mencapai target karena adanya perubahan metode perhitungan dari Perpustakaan Nasional (kurangnya pemenuhan data dukung/eviden).

**INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

No	Aktifitas Membaca	Nilai	Keterangan
1	Kepatuhan	0.281	
2	Variabel Koleksi	0.283	
3	Variabel Tenaga Perpustakaan	0.28	
4	Kinerja	0.264	
5	Variabel Pelayanan	0.262	
6	Variabel Penyelenggaraan/pengelolaan	0.267	
IPLM		12.81	Rendah

Sumber Data : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

2). Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

Target kinerja indikator Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional sebesar 95 dengan realisasi 100 capaian kinerja sebesar 105,26 berdasarkan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dengan perhitungan sebagai berikut :

**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI
YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

No .	No IKK	Uraian	Rumus Perhitungan	Jumlah	Persentase
1	2.w.1.1	Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip (a)	Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar	339.775,00	100,00%
			Arsip Aktif	339.775,00	
2	2.w.1.2	Persentase Arsip Inaktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsi (i)	Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar	256.634,00	100,00%
			Arsip Inaktif	256.634,00	
3	2.w.1.3	Persentase Arsip Statis Yang Telah Dibuatkan Sarana (s)	Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	36.338,00	100,00%
			Arsip Statis	36.338,00	
4	2.w.1.4	Persentase Jumlah Arsip Yang Dimasukkan Dalam SIKN Melalui JIKN (j)	Arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN	36.338,00	100.00%
			Arsip Dinamis dan Arsip Statis	36.338,00	
Jumlah			= (a + i + s + j)/4		100,00%

Sumber data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

a. Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip (IKK 2.w.1.1)

Arsip aktif adalah arsip yang masih sering digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

- Jumlah Arsip Aktif: 339.775 arsip
- Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar: 339.775 arsip
- Capaian: 100%

Makna Capaian:

Seluruh arsip aktif telah terdaftar secara sistematis sehingga mudah ditelusuri dan dimanfaatkan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan, akuntabilitas kinerja, serta pelayanan publik.

b. Persentase Arsip Inaktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip (IKK 2.w.1.2)

Arsip inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun namun masih memiliki nilai guna.

- Jumlah Arsip Inaktif: 256.634 arsip
- Arsip Inaktif yang telah dibuatkan daftar: 256.634 arsip
- Capaian: 100%

Makna Capaian:

Seluruh arsip inaktif telah terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti sah dan referensi dalam audit, pemeriksaan, serta pertanggungjawaban administrasi.

c. Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik (IKK 2.w.1.3)

Arsip statis adalah arsip bernilai sejarah dan permanen yang menjadi memori kolektif daerah.

- Jumlah Arsip Statis: 36.338 arsip
- Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik: 36.338 arsip
- Capaian: 100%

Makna Capaian:

Seluruh arsip statis telah dilengkapi sarana bantu temu balik, sehingga memudahkan akses informasi bagi kepentingan penelitian, sejarah, hukum, dan pertanggungjawaban nasional.

d. Persentase Arsip yang Dimasukkan ke dalam SIKN melalui JIKN (IKK 2.w.1.4)

SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) merupakan sarana integrasi arsip secara nasional.

- Jumlah Arsip Dinamis dan Statis: 36.338 arsip
- Arsip yang telah diunggah ke SIKN/JIKN: 36.338 arsip

- Capaian: 100%

Makna Capaian:

Seluruh arsip yang relevan telah terintegrasi dalam sistem kearsipan nasional, mendukung transparansi, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban pemerintah daerah di tingkat nasional.

Tingkat ketersediaan arsip Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan arsip telah dilaksanakan secara tertib, lengkap, terintegrasi, dan akuntabel, serta sepenuhnya mendukung akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum yang sah, dan pertanggungjawaban nasional.

3). Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Belum melaksanakan Forum Konsultasi Publik Perangkat Daerah menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel.

Target kinerja indikator Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sesuai target kinerja yang ditetapkan.

4). Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Target Kinerja

Pada Tahun 2025, target kinerja indikator IKM Perangkat Daerah ditetapkan sebesar 88,30 dengan kategori Baik. Penetapan target ini mencerminkan komitmen perangkat daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik, efektivitas proses layanan, serta profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran melalui Aplikasi Survey Kukar, realisasi IKM Perangkat Daerah Tahun 2025 mencapai 89,26 dengan kategori Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Analisis Capaian

Realisasi sebesar 89,26 lebih tinggi dibandingkan target 88,30, sehingga indikator kinerja ini tercapai dan melampaui target. Peningkatan nilai IKM tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek pelayanan, antara lain:

- Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan;
- Peningkatan sikap dan kompetensi petugas pelayanan;
- Perbaikan sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
- Pemanfaatan teknologi melalui Aplikasi Survey Kukar yang memudahkan masyarakat dalam memberikan penilaian dan masukan.

Secara keseluruhan, kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Tahun 2025 berada pada kategori Baik dan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

5). Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara diberi mandat target kinerja indikator “Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Ditindak Lanjut” belum ada temuan. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

6). Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Target kinerja Laporan Penyusunan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2025 pada level 3 dan terealisasi sebesar level 3 sesuai target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Kepatuhan PPTK menyusun dan menyampaikan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.

7). Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah

Pada tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat inovasi tentang perpustakaan dan kearsipan. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 1 inovasi (APPRENTICE ARCHIVES/Magang Kearsipan) dari target yang ditetapkan.

8). Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor

Pada tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada pelaporan di SPAN lapor maka tidak ada perlu ditindak lanjuti. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

9). Indikator ini menunjukkan sejauh mana data dari perangkat daerah/instansi telah diinput dan terintegrasi ke dalam platform Satu Data Indonesia sesuai dengan standar data, metadata, dan interoperabilitas yang ditetapkan.

Dengan capaian 100% (target 100%, realisasi 100%), kinerjanya berada pada kategori Sangat Tinggi. Hal ini berarti:

- Seluruh data yang diwajibkan telah berhasil diinput ke dalam Satu Data Indonesia.
- Proses pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data berjalan optimal.
- Koordinasi antar produsen data, walidata, dan pembina data telah terlaksana dengan baik.
- Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan semakin terjamin.

Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam penerapan tata kelola data yang terpadu dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

10). Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah

Target kinerja indikator Pemetaan kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah tahun 2025 dengan 48 laporan dan terealisasi 48 laporan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Faktor yang mendukung pencapaian target kinerja ini antara lain :

- a. Komitmen dan dukungan dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Adanya Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara terkait Kewajiban Perangkat Daerah tentang gerakan mengaji sebelum bekerja.

11). Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tercermin dari capaian Nilai LPPD sebesar 3,7 yang berada pada kategori Tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah telah dilaksanakan dengan baik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu, nilai evaluasi kinerja sebesar 3,2568 dengan persentase capaian 88,02% berada pada kategori Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta konsistensi pencapaian indikator kinerja.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan tren kinerja yang cukup baik dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kinerja ke kategori yang lebih tinggi pada periode selanjutnya.

12). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tercermin dari capaian Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 77 yang berada pada kategori Tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kabupaten telah berjalan dengan baik, terutama dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil penilaian, nilai kinerja sebesar 65,92 dengan tingkat capaian 85,61% termasuk dalam kategori Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, serta adanya komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel. Ke depan, diperlukan penguatan konsistensi penerapan manajemen kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar pengambilan keputusan guna mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintahan yang berkelanjutan.

13). Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani

Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih, dan melayani tercermin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten sebesar 65.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai kinerja yang diperoleh sebesar 71,51 dengan tingkat capaian 110,015%, sehingga berada pada kategori Sangat Tinggi.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten telah berjalan sangat baik, ditandai dengan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, inovasi dalam penyederhanaan proses birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi turut berkontribusi terhadap meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ke depan, capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan budaya kerja berorientasi kinerja, peningkatan kualitas SDM aparatur, serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

14) Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah tercermin dari Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sepenuhnya sesuai dengan target yang direncanakan.

Dengan nilai realisasi sebesar 100 dan tingkat capaian 100%, kinerja Perangkat Daerah berada pada kategori Sangat Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dan terukur, serta didukung oleh koordinasi yang baik antarunit kerja.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan kinerja yang optimal dan berorientasi pada hasil. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan kualitas indikator kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi, serta inovasi berkelanjutan agar kinerja tetap adaptif terhadap tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 94.90 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024) sebesar 202,99 %. Terjadi penurunan kinerja sebesar 108,09 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	72,24	100,33	73	72.54	99.37	Meningkat
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	90	82,66	91,84	95	100.00	105.26	Meningkat
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	15	62,52	416,80	16	12.81	80.06	Menurun

1. Sasaran Strategis :

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, tahun 2024 ditetapkan target sebesar 72 dengan realisasi 72,24 atau 100,33% dari target. Sementara pada tahun 2025, target meningkat menjadi 73 dengan realisasi sebesar 72,54 atau 99,37% dari target.

Secara capaian absolut, realisasi tahun 2025 (72,54) lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 (72,24). Meskipun persentase capaian terhadap target sedikit menurun karena adanya kenaikan target, secara umum kinerja menunjukkan tren meningkat. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat

daerah, meskipun masih diperlukan optimalisasi agar target yang lebih tinggi dapat tercapai sepenuhnya.

2. Sasaran Strategis :

Terwujudnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional

Pada indikator Tingkat Ketersediaan Arsip, tahun 2024 ditetapkan target sebesar 90 dengan realisasi 82,66 atau 91,84% dari target. Pada tahun 2025, target meningkat menjadi 95 dan realisasi mencapai 100,00 atau 105,26% dari target.

Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi realisasi maupun persentase capaian. Jika pada tahun 2024 target belum sepenuhnya tercapai, maka pada tahun 2025 realisasi tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan arsip dan meningkatnya komitmen terhadap penyediaan arsip sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

3. Sasaran Strategis :

Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan yang Berkualitas guna Mendukung Pengembangan Budaya Baca Masyarakat

Pada indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, tahun 2024 ditetapkan target sebesar 15 dengan realisasi 62,52 atau 416,80% dari target. Pada tahun 2025, target meningkat menjadi 16, namun realisasi hanya mencapai 12,81 atau 80,06% dari target. Secara perbandingan, terjadi penurunan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2025. Meskipun target mengalami peningkatan, realisasi tahun 2025 berada di bawah capaian tahun sebelumnya dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Penurunan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap program dan kegiatan pengembangan literasi masyarakat, termasuk efektivitas strategi, jangkauan layanan perpustakaan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

Secara keseluruhan, dari tiga sasaran strategis yang diukur :

- Dua indikator menunjukkan tren peningkatan kinerja (Nilai SAKIP dan Tingkat Ketersediaan Arsip).
- Satu indikator mengalami penurunan kinerja (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat).

Hal ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola dan kearsipan mengalami perbaikan yang positif, sementara sektor pengembangan literasi masyarakat memerlukan perhatian dan strategi perbaikan yang lebih terarah pada tahun berikutnya.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target

Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2025)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	72.54	99.37
Tingkat Ketersediaan Arsip	95	100.00	105.26
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16	12.81	80.06

Secara umum, capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2025. Dari tiga indikator kinerja yang ditetapkan, dua indikator menunjukkan capaian yang sangat baik, sementara satu indikator masih memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target akhir Renstra Tahun 2025 ditetapkan sebesar 73. Sampai dengan Tahun 2025, realisasi yang dicapai adalah 72,54 atau sebesar 99,37% dari target.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas perangkat daerah hampir sepenuhnya memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan. Meskipun belum mencapai angka target secara penuh, selisih yang sangat kecil mengindikasikan bahwa sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah berjalan dengan baik dan konsisten.

2. Tingkat Ketersediaan Arsip

Target akhir Renstra Tahun 2025 sebesar 95, sedangkan realisasi sampai dengan Tahun 2025 mencapai 100,00 atau 105,26% dari target.

Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

strategis. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan pengelolaan arsip, baik dari aspek ketersediaan, penataan, maupun pemanfaatannya sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah. Indikator ini menjadi salah satu capaian kinerja yang sangat optimal dalam periode Renstra.

3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Target akhir Renstra Tahun 2025 ditetapkan sebesar 16. Namun hingga Tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 12,81 atau 80,06% dari target.

Capaian ini menunjukkan bahwa target jangka menengah belum dapat terpenuhi secara optimal. Persentase capaian yang masih berada di bawah 100% mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap strategi dan program pengembangan literasi masyarakat, termasuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan, perluasan akses, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dan target akhir Renstra Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

- Indikator Tingkat Ketersediaan Arsip telah melampaui target jangka menengah.
- Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah hampir mencapai target dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.
- Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat belum mencapai target dan memerlukan langkah perbaikan strategis.

Secara keseluruhan, sebagian besar sasaran strategis telah tercapai sesuai perencanaan, namun tetap diperlukan penguatan pada aspek pengembangan literasi masyarakat agar seluruh target Renstra dapat terpenuhi secara optimal.

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100 % atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SasaranStrategis	IndikatorKinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3-5)	(7)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88,05	11,32	
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	105,26	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	84,54	20,72	
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	80,06	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	63,26	16,80	

Efisiensi penggunaan sumber daya diukur dengan membandingkan capaian kinerja sasaran dengan capaian realisasi anggaran program. Semakin besar selisih positif antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, maka semakin efisien penggunaan sumber daya yang dilakukan.

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja sasaran sebesar 99,37%, sedangkan realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 88,05%. Dengan demikian, tingkat efisiensi yang dihasilkan sebesar 11,32%.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang hampir memenuhi target dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari total pagu yang tersedia. Kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif dan efisien dalam

mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

2. Terwujudnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional

Pada indikator **Tingkat Ketersediaan Arsip**, capaian kinerja sasaran mencapai 105,26%, melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi anggaran pada :

- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- Program Perizinan Penggunaan Arsip

mencapai 84,54%. Dengan demikian, tingkat efisiensi tercatat sebesar 20,72%.

Angka ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik, karena dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap, kinerja justru melampaui target. Hal ini mengindikasikan optimalisasi perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, serta pengendalian anggaran yang efektif.

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan yang Berkualitas guna Mendukung Pengembangan Budaya Baca Masyarakat

Pada indikator **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**, capaian kinerja sasaran sebesar 80,06%, sedangkan realisasi anggaran pada:

- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

mencapai 63,26%. Tingkat efisiensi tercatat sebesar 16,80%.

Meskipun indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan, dari sisi penggunaan anggaran tetap menunjukkan efisiensi karena realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Namun demikian, efisiensi ini perlu diimbangi dengan peningkatan efektivitas program agar capaian kinerja di bidang literasi masyarakat dapat lebih optimal pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya pada setiap sasaran strategis menunjukkan tingkat efisiensi yang positif, dengan rincian:

- Efisiensi 11,32% pada sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Efisiensi 20,72% pada sasaran ketersediaan arsip (tertinggi dan paling optimal).
- Efisiensi 16,80% pada sasaran pengembangan literasi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dikelola secara hemat dan terkendali. Ke depan, efisiensi anggaran perlu tetap dipertahankan dengan tetap memastikan bahwa efektivitas dan kualitas capaian kinerja semakin meningkat.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggambarkan tingkat pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran. Pada periode pelaporan ini, Perangkat Daerah menetapkan target anggaran sebesar Rp 19.699.802.758,00. Dari target tersebut, realisasi anggaran yang berhasil dicapai adalah sebesar Rp 17.345.756.444,00, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 88,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dan direalisasikan dengan baik. Persentase realisasi yang mendekati 90% mencerminkan adanya efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian terhadap kondisi di lapangan, atau adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana. Secara keseluruhan, kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan baik, namun ke depan masih diperlukan upaya peningkatan dalam optimalisasi penyerapan anggaran dan penyempurnaan perencanaan agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara maksimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Indikator kinerja Program Pengelolaan Arsip Tahun 2025 adalah Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah, yang mencerminkan kualitas tata kelola kearsipan dalam mendukung tertib administrasi, akuntabilitas, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Untuk mencapai indikator tersebut, telah ditetapkan target anggaran sebesar Rp 509.376.070,00.

Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran Program Pengelolaan Arsip mencapai Rp 459.237.809,00 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 90,16%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam rangka peningkatan pengelolaan kearsipan daerah telah dilaksanakan

dengan baik, seperti pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan.

Persentase capaian di atas 90% mengindikasikan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh adanya efisiensi kegiatan, penyesuaian jadwal pelaksanaan, atau optimalisasi sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

Secara keseluruhan, kinerja Program Pengelolaan Arsip Tahun 2025 dapat dikategorikan baik, karena mampu mendukung pencapaian predikat pengelolaan kearsipan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta berkontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Indikator kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Tahun 2025 adalah Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melindungi, mengamankan, dan menyelamatkan arsip sebagai aset informasi yang bernilai guna bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, telah ditetapkan target anggaran sebesar Rp 442.513.700,00. Realisasi anggaran Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip mencapai Rp 350.441.600,00, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 79,19%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan, seperti upaya perlindungan arsip dari kerusakan, kehilangan, dan bencana, serta kegiatan penyelamatan arsip bernilai guna dan bernilai sejarah.

Namun demikian, capaian yang masih berada di bawah 80% mengindikasikan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, penyesuaian prioritas kegiatan, kendala teknis di lapangan, atau adanya kegiatan yang belum dapat direalisasikan secara maksimal sesuai dengan perencanaan awal.

Secara keseluruhan, kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Tahun 2025 dapat dikategorikan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan agar pada periode berikutnya capaian kinerja dan predikat pengelolaan kearsipan daerah dapat ditingkatkan secara lebih optimal.

4) PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Indikator kinerja Program Perizinan Penggunaan Arsip Tahun 2025 mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan arsip serta kualitas layanan perizinan penggunaan arsip bagi pemangku kepentingan. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, telah ditetapkan target anggaran sebesar Rp 34.110.800,00. Realisasi anggaran Program Perizinan Penggunaan Arsip mencapai Rp 28.741.102,00, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 84,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam rangka pelayanan perizinan penggunaan arsip telah dilaksanakan dengan baik, termasuk pengelolaan permohonan izin, pelayanan akses arsip, serta penerapan prosedur dan standar kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, keterbatasan jumlah permohonan perizinan, atau penyesuaian pelaksanaan layanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Secara keseluruhan, kinerja Program Perizinan Penggunaan Arsip Tahun 2025 dapat dikategorikan baik, karena telah mampu mendukung pencapaian predikat pengelolaan kearsipan daerah serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola dan pemanfaatan arsip secara tertib, aman, dan bertanggung jawab.

5) PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indikator kinerja Program Pembinaan Perpustakaan Tahun 2025 adalah Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan, yang menggambarkan tingkat minat baca dan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, telah ditetapkan target anggaran sebesar Rp 6.053.496.800,00. Realisasi anggaran Program Pembinaan Perpustakaan mencapai Rp 3.373.277.463,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 55,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan optimal sesuai dengan perencanaan awal. Rendahnya tingkat capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian kegiatan pembinaan perpustakaan belum terlaksana secara maksimal atau belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pelaksanaan kegiatan promosi dan literasi, belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan, perubahan pola perilaku masyarakat dalam mengakses informasi, serta kendala pelaksanaan kegiatan yang bersifat tatap muka. Selain itu,

penyesuaian kebijakan dan prioritas anggaran juga dapat berpengaruh terhadap rendahnya realisasi anggaran.

Secara keseluruhan, kinerja Program Pembinaan Perpustakaan Tahun 2025 dapat dikategorikan kurang optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah perbaikan ke depan, seperti peningkatan kualitas layanan perpustakaan, penguatan program literasi masyarakat, inovasi layanan berbasis digital, serta optimalisasi promosi perpustakaan agar mampu meningkatkan kunjungan masyarakat dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

6) PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Indikator kinerja Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Tahun 2025 mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga, merawat, dan melestarikan koleksi nasional serta naskah kuno sebagai warisan budaya dan sumber pengetahuan yang bernilai sejarah tinggi. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, telah ditetapkan target anggaran sebesar Rp 287.191.059,00.

Realisasi anggaran program mencapai Rp 203.316.960,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 70,80%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pelestarian telah dilaksanakan, seperti konservasi koleksi, perawatan fisik naskah kuno, pendataan, serta upaya pencegahan kerusakan koleksi akibat faktor usia dan lingkungan.

Namun demikian, capaian kinerja yang masih berada pada kisaran 70% mengindikasikan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan, kebutuhan sarana prasarana khusus untuk pelestarian, kendala teknis dalam penanganan koleksi bernilai tinggi, serta penyesuaian prioritas kegiatan selama tahun berjalan. Secara keseluruhan, kinerja Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Tahun 2025 dapat dikategorikan cukup, namun masih memerlukan peningkatan melalui penguatan perencanaan, pemenuhan sarana pendukung pelestarian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar upaya pelestarian warisan budaya dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	88,05	88,05	Sistem perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja telah berjalan secara konsisten dan terintegrasi. Hal ini didukung oleh pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja, penyusunan dokumen kinerja yang tepat waktu, serta meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	100	84,54	84,54	Diperlukan penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kualitas pengelolaan dan perlindungan arsip, serta optimalisasi layanan perizinan penggunaan arsip agar tingkat ketersediaan arsip dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan mendukung akuntabilitas kinerja serta pertanggungjawaban nasional secara optimal
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100	63,26	63,26	Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan, keterbatasan inovasi layanan perpustakaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta masih rendahnya minat baca sebagian masyarakat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian koleksi, termasuk koleksi nasional dan naskah kuno, belum sepenuhnya mampu menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan literasi diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih strategis. Ke depan, perlu dilakukan penguatan pembinaan perpustakaan, peningkatan kualitas dan relevansi koleksi, pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital, serta intensifikasi program literasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan upaya tersebut, diharapkan penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas dapat terwujud dan mampu mendorong peningkatan budaya baca masyarakat secara berkelanjutan.

Capaian Kinerja Program Penunjang terhadap Pencapaian Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Program Penunjang: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target Program: 100

Realisasi: 88,05 (88,05%)

Realisasi kinerja program penunjang mencapai 88,05% dari target yang ditetapkan. Meskipun belum mencapai 100%, program ini berkontribusi signifikan terhadap capaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang berada pada kategori sangat baik.

Keberhasilan ini didukung oleh sistem perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi yang berjalan konsisten dan terintegrasi. Pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja, penyusunan dokumen yang tepat waktu, serta meningkatnya kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor utama pendukung keberhasilan. Dengan demikian, meskipun serapan program belum maksimal, efektivitas pelaksanaan kegiatan tetap mampu mendorong pencapaian sasaran strategis secara optimal.

2. Terwujudnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional

Indikator: Tingkat Ketersediaan Arsip

Program Penunjang:

- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- Program Perizinan Penggunaan Arsip

Target Program: 100

Realisasi: 84,54 (84,54%)

Realisasi program sebesar 84,54% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya optimal dari sisi serapan. Namun demikian, capaian indikator kinerja sasaran justru melampaui target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa program-program kearsipan telah berjalan secara efektif, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kualitas pengelolaan dan perlindungan arsip, serta optimalisasi layanan perizinan penggunaan arsip. Ke depan, peningkatan integrasi sistem kearsipan dan pengawasan pelaksanaan program akan semakin memperkuat keberlanjutan capaian yang telah diraih.

3. Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan yang Berkualitas guna Mendukung Pengembangan Budaya Baca Masyarakat

Indikator: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Program Penunjang:

- Program Pembinaan Perpustakaan
- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Target Program: 100

Realisasi: 63,26 (63,26%)

Realisasi program hanya mencapai 63,26%, yang berimplikasi pada belum optimalnya capaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara rendahnya serapan dan pelaksanaan program dengan capaian kinerja sasaran yang belum memenuhi target.

Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan, keterbatasan inovasi layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta masih rendahnya minat baca sebagian masyarakat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian koleksi, termasuk koleksi nasional dan naskah kuno, belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya tarik perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan literasi.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih strategis, antara lain penguatan pembinaan perpustakaan, peningkatan kualitas dan relevansi koleksi, pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital, serta intensifikasi program literasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dan kolaboratif.

Secara keseluruhan, capaian kinerja program penunjang menunjukkan bahwa:

- Program penunjang akuntabilitas kinerja dan kearsipan telah berjalan cukup efektif dan mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis.
- Program di bidang perpustakaan masih memerlukan penguatan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun inovasi layanan agar dapat mendorong peningkatan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan yang terarah, diharapkan seluruh program penunjang dapat semakin selaras dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran strategis pada periode berikutnya.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 80.52 %. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator kinerja	Target Tahun 2025		Realisasi		% Capaian	
			Fisik	keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	keuangan
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42.34	6,053,496,800	26.1	3,373,277,463	61.64	55.72
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	7.24	2,576,707,780	9.39	1,929,467,891	129.70	74.88
	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12 Perpustakaan	80,746,580	12 Perpustakaan	41,452,800	100.00	51.34
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	7 Perpustakaan	1,359,953,600	7 Perpustakaan	961,451,430	100	70.70
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 layanan	91,220,000	48 layanan	87,927,800	100.00	96.39
	Pembinaan Perpustakaan umum Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	69,517,250	6 Perpustakaan	38,188,110	100.00	54.93

	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	212,629,400	70 Orang	112,273,676	70.00	52.80
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	97,246,700	2 Dokumen	53,739,750	100.00	55.26
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46590 Ek semplar	251,603,810	46590 Ek semplar	245,524,962	100	97.58
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	300 Eksemplar	106,886,320	300 Eksemplar	91,205,100	100	85.33
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2 Perpustakaan	306,904,120	2 Perpustakaan	297,704,263	100	97.00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	5 kali	3,476,789,020	5 kali	1,443,809,572	100	41.53
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	123,043,500	4 Lokus	43,261,775	100	35.16

	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Perpustakaan	2,791,867,320	6 Perpustakaan	991,835,170	50.00	35.53
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	177,701,000.00	12 Orang	144,804,000	100.00	81.49
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	322,352,600	5 Perpustakaan	255,878,627	166.67	79.38
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	61,824,600	1 Orang	8,030,000	33.33	12.99
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	80%	287,191,059	80%	203,316,960	100.00	70.80
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno	5 Dokumen	191,845,950	5 Dokumen	152,879,960	100.00	79.69
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	55,762,800	5 Eksemplar	29,960,000	100.00	53.73
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	200 Orang	136,083,150	150 Orang	122,919,960	75.00	90.33
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis Nusantara yg tersimpan dan/atau yang terdaftar di wilayah Kukar	300 Eksemplar	95,345,109	300 Eksemplar	50,437,000	100.00	52.90

	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	200 Eksemplar	72,060,759	200 Eksemplar	44,167,000	100.00	61.29
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300 Eksemplar	23,284,350	348 Eksemplar	6,270,000	116.00	26.93
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	19,699,802,758	72.54	17,345,756,444	99.37	88.05
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	333,040,799	11 Dokumen	274,091,961	100.00	82.30
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	165,273,799	3 Dokumen	159,785,472	100.00	96.68
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	27,336,000	3 Laporan	25,389,900	100.00	92.88
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	39,072,400	2 Laporan	11,683,789	100.00	29.90
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	20,338,600	1 Dokumen	18,857,800	100.00	92.72
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	55,785,400	1 Data	39,261,200	100.00	70.38
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	25,234,600	1 Berita Acara	19,113,800	100.00	75.74

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5 Laporan	12,694,057,430	5 Laporan	11,676,581,019	100.00	91.98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	12,117,853,430	95 Orang/bulan	11,113,316,019	100.00	91.71
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	470,870,000	1 Dokumen	470,870,000	100.00	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13,087,000	1 Laporan	11,747,500	100.00	89.76
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	79,160,000	3 Laporan	68,900,000	100.00	87.04
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	13,087,000	1 Dokumen	11,747,500	100.00	89.76
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	62,051,600	1 Dokumen	46,436,000	100.00	74.83
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	46,850,000	1 Laporan	40,500,000	100.00	86.45
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	4,355,600	1 Laporan	1,010,000	100.00	23.19
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10,846,000	1 Dokumen	4,926,000	100.00	45.42
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	112,049,200	2 Dokumen	59,073,440	100.00	52.72

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	0 Paket	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	88,462,200	3 Orang	39,695,440	6.00	44.87
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	23,587,000	12 Orang	19,378,000	100.00	82.16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 layanan	2,509,959,280	8 layanan	2,255,291,767	100.00	89.85
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,500,000	1 Paket	19,317,000	100.00	85.85
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1,644,510,380	9 Paket	1,538,618,204	100.00	93.56
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36,000,000	1 Paket	33,331,000	100.00	92.59
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,426,000	1 Paket	7,508,000	100.00	79.65
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	167,509,800	1 Dokumen	164,443,799	100.00	98.17
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	181,195,000	1 Paket	154,017,000	100.00	85.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	109,108,100	55 Laporan	106,725,264	27.50	97.82
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	189,710,000	1 Dokumen	86,110,000	100.00	45.39

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	145,221,500	100.00	96.81
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	3,492,250,141	12 Bulan	2,592,249,662	100.00	74.23
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,320,000	1 Laporan	1,300,000	100.00	98.48
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	591,091,705	12 Laporan	492,769,791	100.00	83.37
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,899,838,436	12 Laporan	2,098,179,871	100.00	72.36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	228 Kali	496,394,308	228 Kali	442,032,595	100.00	89.05
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	115,500,000	6 Unit	102,302,470	100.00	88.57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	145,000,000	12 Unit	112,099,225	100.00	77.31
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit	121,553,708	156 Unit	116,510,000	74.29	95.85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	114,340,600	4 Unit	111,120,900	100.00	97.18
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase Arsip yang dikelola	100	509,376,070	100	459,237,809	100.00	90.16
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola	66101 Berkas	368,072,220	66101 Berkas	332,052,592	100.00	90.21

	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	72,219,400	1000 Berkas	54,668,000	100.00	75.70
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas	34,018,100	1000 Berkas	28,724,842	100.00	84.44
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	261,834,720	4 Laporan	248,659,750	100.00	94.97
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	25000 Arsip	68,343,650	25000 Arsip	65,822,700	100.00	96.31
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25000 Arsip	68,343,650	25000 Arsip	65,822,700	100.00	96.31
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memasukkan Arsip dalam SIKN melalui JIKN	59 PD	72,960,200	59 PD	61,362,517	100.00	84.10
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	72,960,200	4 Laporan	61,362,517	100.00	84.10
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen	442,513,700	100 Persen	350,441,600	105.26	79.19
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK	1000 Arsip	79,698,400	1000 Arsip	19,960,100	100.00	25.04
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	79,698,400	1000 Arsip	19,960,100	100.00	25.04

	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang diselamatkan sesuai dengan NSPK	1000 Berkas	287,563,500	1000 Berkas	269,941,500	100.00	93.87
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Daftar	132,408,500	2 Daftar	122,511,500	100.00	92.53
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	155,155,000	500 Arsip	147,430,000	100.00	95.02
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	500 Arsip	42,545,300	500 Arsip	35,282,500	100.00	82.93
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500 Arsip	42,545,300	500 Arsip	35,282,500	100.00	82.93
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah arsip Statis yang ditemukan setelah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK	500 Arsip	32,706,500	500 Arsip	25,257,500	100.00	77.22
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	32,706,500	500 Arsip	25,257,500	100.00	77.22
6	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Ijin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100 Persen	34,110,800	100 Persen	28,741,102	100.00	84.26

	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	1 Izin	34,110,800	1 Izin	28,741,102	100.00	84.26
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	34,110,800	12 Arsip	28,741,102	100.00	84.26
Jumlah				27,026,491,187		21,760,771,378		

Table 3.7

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2024) realisasi anggaran sebesar 90.60 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		TOTAL		
		K	Satuan	K	Satuan	%.
2.23.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		22,155,300,885		20,081,539,223		90.64
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		699,738,367		667,089,065		95.33
2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp93,738,367		Rp92,444,000		98.62%
1	2.23.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00%
2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp50,000,000		Rp45,060,000		90.12%
2	2.23.01.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp50,000,000		Rp45,060,000		90.12%
3	2.23.01.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp256,000,000		Rp250,841,065		97.98%
4	2.23.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100.00%
2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp250,000,000		Rp233,684,000		93.47%
5	2.23.01.2.01.0007.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3	Laporan	100.00%
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12,267,522,355		11,505,567,642		93.79

2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp12,087,522,355		Rp11,335,507,642		93.78%
6	2.23.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,330	Orang/Bulan	1,330	Orang/Bulan	100.00%
2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp50,000,000		Rp45,060,000		90.12%
7	2.23.01.2.02.0005.01 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp80,000,000		Rp79,940,000		99.93%
8	2.23.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	100.00%
2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Rp50,000,000		Rp45,060,000		90.12%
9	2.23.01.2.02.0008.01 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		80,000,000		79,977,000		99.97
2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp80,000,000		Rp79,977,000		99.97%
10	2.23.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		200,000,000		188,560,544		94.28
2.23.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp200,000,000		Rp188,560,544		94.28%
11	2.23.01.2.05.0010.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12	Orang	12	Orang	100.00%
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		3,250,000,000		2,979,803,285		91.69
2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp200,000,000		Rp168,734,000		84.37%
12	2.23.01.2.06.0001.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100.00%
2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp400,000,000		Rp370,002,900		92.50%
13	2.23.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100.00%
2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp100,000,000		Rp56,475,000		56.48%
14	2.23.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100.00%
2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp850,000,000		Rp758,670,552		89.26%
15	2.23.01.2.06.0006.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%

	2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material		Rp800,000,000		Rp768,215,000	96.03%
16	2.23.01.2.06.0007.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	100.00%
	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp550,000,000		Rp543,641,967	98.84%
17	2.23.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	200	Laporan	100.00%
	2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp250,000,000		Rp246,730,226	98.69%
18	2.23.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
	2.23.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp100,000,000		Rp67,333,640	67.33%
19	2.23.01.2.06.0011.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,408,040,163		3,904,974,168	88.59
	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp10,000,000		Rp9,900,000	99.00%
20	2.23.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp441,709,865		Rp425,866,527	96.41%
21	2.23.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp3,956,330,298		Rp3,469,207,641	87.69%
22	2.23.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	13	Laporan	100.00%
	2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,250,000,000		755,567,519	60.45
	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp150,000,000		Rp142,693,425	95.13%
23	2.23.01.2.09.0001.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	4	Unit	100.00%
	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp150,000,000		Rp149,320,399	99.55%
24	2.23.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	6	Unit	100.00%
	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp100,000,000		Rp98,710,000	98.71%
25	2.23.01.2.09.0006.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206	Unit	206	Unit	100.00%
	2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp850,000,000		Rp364,843,695	42.92%

26	2.23.01.2.09.0010.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	100.00%
2.23.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		8,707,000,000		7,842,165,270		90.07
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5,307,000,000		4,651,965,486		87.66
2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Rp1,110,000,000		Rp1,092,367,160		98.41%
27	2.23.02.2.01.0001.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2	layanan	2	layanan	100.00%
2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp2,250,000,000		Rp1,772,848,730		78.79%
28	2.23.02.2.01.0002.01 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2	Perpustakaan	2	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp437,000,000		Rp427,678,000		97.87%
29	2.23.02.2.01.0003.01 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	250	Eksemplar	250	Eksemplar	100.00%
2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Rp300,000,000		Rp248,734,966		82.91%
30	2.23.02.2.01.0004.01 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3	Perpustakaan	3	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Rp25,000,000		Rp16,475,500		65.90%
31	2.23.02.2.01.0005.01 Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2	Perpustakaan	2	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp200,000,000		Rp169,991,500		85.00%
32	2.23.02.2.01.0006.01 Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34	Orang	34	Orang	100.00%
2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		Rp485,000,000		Rp477,725,100		98.50%
33	2.23.02.2.01.0007.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48	layanan	32	layanan	66.67%
2.23.02.2.01.0008 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Rp300,000,000		Rp290,215,000		96.74%
34	2.23.02.2.01.0008.01 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46,590	Eksemplar	46,590	Eksemplar	100.00%

2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp200,000,000		Rp155,929,530		77.96%
35	2.23.02.2.01.0010.01 Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3,400,000,000		3,190,199,784		93.83
2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Rp200,000,000		Rp136,003,478		68.00%
36	2.23.02.2.02.0001.01 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4	Lokus	4	Lokus	100.00%
2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp2,550,000,000		Rp2,511,741,066		98.50%
37	2.23.02.2.02.0002.01 Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	1	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Rp200,000,000		Rp184,017,500		92.01%
38	2.23.02.2.02.0003.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	2	Orang	2	Orang	100.00%
2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Rp350,000,000		Rp307,900,240		87.97%
39	2.23.02.2.02.0004.01 Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3	Perpustakaan	3	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp100,000,000		Rp50,537,500		50.54%
40	2.23.02.2.02.0005.01 Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3	Orang	3	Orang	100.00%
2.23.2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		530,000,000		524,340,700		98.93
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		180,000,000		177,283,500		98.49
2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Rp80,000,000		Rp78,751,500		98.44%
41	2.23.03.2.01.0001.01 Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2	Orang	2	Orang	100.00%
2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Rp100,000,000		Rp98,532,000		98.53%
42	2.23.03.2.01.0002.01 Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5	Eksemplar	5	Eksemplar	100.00%
2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		350,000,000		347,057,200		99.16
2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Rp300,000,000		Rp298,337,200		99.45%

43	2.23.03.2.02.0001.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300	Eksempalar	300	Eksempalar	100.00%
2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Rp50,000,000		Rp48,720,000		97.44%
44	2.23.03.2.02.0002.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300	Eksempalar	300	Eksempalar	100.00%
2.24.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		1,275,000,000		1,195,431,862		93.76
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		625,000,000		589,434,912		94.31
2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Rp150,000,000		Rp149,219,484		99.48%
45	2.24.02.2.01.0001.01 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00%
2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Rp75,000,000		Rp66,428,000		88.57%
46	2.24.02.2.01.0002.01 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00%
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Rp400,000,000		Rp373,787,428		93.45%
47	2.24.02.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Laporan	4	Laporan	100.00%
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		150,000,000		125,600,000		83.73
2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Rp150,000,000		Rp125,600,000		83.73%
48	2.24.02.2.02.0002.01 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	24,500	Arsip	24,500	Arsip	100.00%
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		500,000,000		480,396,950		96.08
2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		Rp500,000,000		Rp480,396,950		96.08%
49	2.24.02.2.03.0002.01 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	laporan	5	laporan	100.00%
2.24.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		925,000,000		817,313,946		88.36
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		200,000,000		168,952,500		84.48
2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Rp200,000,000		Rp168,952,500		84.48%
50	2.24.03.2.01.0001.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1,000	Arsip	1,000	Arsip	100.00%
2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		200,000,000		193,644,000		96.82

2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Rp200,000,000		Rp193,644,000		96.82%
51	2.24.03.2.02.0001.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Berkas	671	Berkas	134.20%
2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		225,000,000		206,130,000		91.61
2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp75,000,000		Rp62,870,000		83.83%
52	2.24.03.2.03.0001.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500	Daftar	500	Daftar	100.00%
2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp150,000,000		Rp143,260,000		95.51%
53	2.24.03.2.03.0002.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		100,000,000		99,256,996		99.26
2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Rp100,000,000		Rp99,256,996		99.26%
54	2.24.03.2.04.0002.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		200,000,000		149,330,450		74.67
2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang		Rp200,000,000		Rp149,330,450		74.67%
55	2.24.03.2.05.0001.01 Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		75,000,000		42,314,000		56.42
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		75,000,000		42,314,000		56.42
2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Rp75,000,000		Rp42,314,000		56.42%
56	2.24.04.2.01.0002.01 Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12	Arsip	12	Arsip	100.00%
JUMLAH		33,667,300,885		30,503,105,001		90.60

Dengan demikian, pada tahun 2025 terjadi Penurunan realisasi anggaran sebesar 10.08 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 berada pada kategori Tinggi dengan rata-rata sebesar 80,52%. Capaian tersebut merupakan hasil akumulasi kinerja dari enam program yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai kinerja sebesar 88,05% dan termasuk dalam kategori Tinggi. Capaian ini menunjukkan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
2. Program Pengelolaan Arsip mencatat capaian kinerja tertinggi, yaitu sebesar 90,16%, dengan kategori Tinggi, yang mencerminkan efektivitas pengelolaan arsip dinamis maupun statis sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip memperoleh capaian kinerja sebesar 79,19% dan termasuk kategori Tinggi, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pelaksanaan kegiatan perlindungan arsip secara menyeluruh.
4. Program Perizinan Penggunaan Arsip mencapai kinerja sebesar 84,26% dengan kategori Tinggi, menunjukkan pelayanan perizinan arsip yang relatif baik dan berjalan sesuai target.
5. Program Pembinaan Perpustakaan menunjukkan capaian kinerja terendah, yaitu sebesar 55,72%, dan berada pada kategori Rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan, baik dari sisi sumber daya, anggaran, maupun jangkauan layanan.
6. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno mencapai kinerja sebesar 70,80% dan berada pada kategori Sedang, yang menunjukkan perlunya peningkatan upaya pelestarian dan pengembangan koleksi secara berkelanjutan.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan. Pada Tahun 2024, capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercatat sebesar 90,60%, sehingga terjadi penurunan sebesar 10,08%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya capaian pada Program Pembinaan Perpustakaan serta belum optimalnya pelaksanaan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Secara keseluruhan, meskipun capaian kinerja Tahun 2025 masih berada pada kategori Tinggi, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja, khususnya pada program-program yang capaian kerjanya masih rendah dan sedang, agar kinerja di tahun berikutnya dapat kembali meningkat.

4.2 Perbaikan Ke Depan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Upaya perbaikan ke depan akan difokuskan pada optimalisasi faktor pendukung serta penanganan faktor penghambat yang memengaruhi capaian kinerja, khususnya pada program yang masih berada pada kategori rendah dan sedang.

Dari sisi faktor penghambat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan dan perpustakaan, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, belum meratanya pembinaan perpustakaan serta rendahnya tingkat partisipasi dan literasi masyarakat turut memengaruhi rendahnya capaian pada Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

Sementara itu, faktor pendukung berupa komitmen pimpinan, dukungan kebijakan daerah, serta sinergi dengan perangkat daerah lain dan pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan juga menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Berdasarkan kondisi tersebut, langkah-langkah perbaikan ke depan yang akan dilakukan antara lain :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi di bidang kearsipan dan perpustakaan.
2. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran, dengan memprioritaskan program dan kegiatan strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan capaian kinerja.
3. Penguatan sarana dan prasarana, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan arsip dan layanan perpustakaan berbasis elektronik.
4. Peningkatan pembinaan dan pendampingan perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah dan desa, agar kualitas layanan dan pengelolaannya semakin merata.
5. Penguatan kerja sama dan kolaborasi dengan instansi terkait, komunitas literasi, serta pihak swasta dalam rangka mendukung program pembinaan dan pelestarian koleksi.

6. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja, guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target serta dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat.

Dengan dilaksanakannya langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun-tahun mendatang dapat meningkat secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.